



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meninjaklanjuti ketentuan Pasal 17 dan Lampiran angka c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Penerapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, system fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.

10. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI-SPAM Daerah Kabupaten Banjar adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Daerah;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III KSDP-SPAM DAERAH

Pasal 3

- (1). KSDP-SPAM Daerah, ditetapkan sebagai dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM di dalam satu Daerah Administrasi.
- (2). KSDP-SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Kabupaten Banjar;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar; dan

- e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3). KSDP-SPAM Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. isu strategis, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. rencana aksi percepatan investasi bidang air minum; dan
- f. penutup.

Pasal 5

KSDP-SPAM yang ditetapkan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 6

- (1) KSDP-SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Skenario Penyelenggaraan SPAM yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 63

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 63 Tahun 2015

TANGGAL 23 Desember 2015

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Millenium Development Goals (MDG's) merupakan komitmen Nasional dan Global dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. Salah satu dalam target MDS's adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Namun hingga saat ini belum semua masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Jumlah terbesar penduduk yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah masyarakat yang bermukim diperdesaan dan pinggiran kota. Masyarakat tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan lingkungan permukiman yang kurang sehat. Kelayakan air minum harus memenuhi kelayakan secara kualitas maupun kuantitas.

Pemerintah pusat telah menargetkan sampai akhir tahun 2019 mencapai 100% penanganan air minum yang layak dan target standar pelayanan minimal sebesar 81,77% akses terhadap air minum yang aman. Dalam upaya pemenuhan layanan air minum secara nasional, pemerintah pusat menyediakan perangkat kebijakan dan arahan serta program kepada daerah dalam upaya mendorong percepatan capaian pelayanan air minum masing-masing daerah. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan dalam upaya percepatan layanan air minum dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menegaskan setiap daerah harus memiliki strategi pengembangan air minum. Keberadaan KSDP-SPAM merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pengembangan SPAM sesuai amanat PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM

telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada)

Khusus untuk Kabupaten Banjar yang memiliki luas wilayah $\pm 4.688 \text{ km}^2$ yang merupakan wilayah terluas urutan ke tiga di Kalimantan Selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 545.397 jiwa (sumber: BPS tahun 2015) dan angka pertumbuhan penduduk mencapai 2,11% pertahun. Kabupaten Banjar memiliki 20 Kecamatan dan 290 kelurahan/desa. Dari 20 kecamatan masih terdapat 13 kecamatan dengan 75 desa/kelurahan yang masih termasuk dalam kategori rawan terhadap akses air bersih.

Akses penduduk Kabupaten Banjar terhadap sumber air minum yang aman dan terlindungi pada tahun 2014 sebesar 50,16%, kondisi ini belum memenuhi target nasional dalam RPJMN 2010-2014 yaitu sebesar 70%. Akses penduduk terhadap sumber air minum tersebut sebagian besar terlayani oleh perpipaan sebesar 28,35% dan bukan jaringan perpipaan 21,81%.

Dalam visi pembangunan Kabupaten Banjar 2011-2015, yaitu visi ketiga "Memantapkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Iklim Investasi". Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Banjar yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar ini bertujuan untuk:

Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM dan upaya pencapaian sasaran pengembangan SPAM yang ada di daerah;

Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

LANDASAN HUKUM

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 4 dan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 4 dan Lampiran Peraturan Menteri tersebut.

KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35/MENLH/7 Tahun 1995 tentang Program kali Bersih;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 269 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 337 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Keputusan Menteri Kimpraswil No. 534 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil;

Keputusan Menteri Kesehatan No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

RUANG LINGKUP

PENGERTIAN

Masalah semua yang ada dalam Jakstranas

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha

Millenium Development Goals (MDG's)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;

Hasil kajian kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;

Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan (KDSP) sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten Banjar berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan air minum Kabupaten Banjar berikut kebijakan dan strategi-strategi pencapaiannya. Adapun ruang lingkun KDSP SPAM Kabupaten Banjar meliputi:

Tujuan dan sasaran pengembangan

Dasar kebijakan

Pendekatan penanganan

Prioritas pengembangan

Konsepsi kebijakan operasional, dan

Rencana strategis dan program pengembangan SPAM

METODE PENYUSUNAN

PERSIAPAN

Identifikasi dan analisis kondisi pelayanan penyediaan air minum pada saat ini;

Identifikasi target nasional dalam pengembangan SPAM;

Identifikasi dan analisis produk kebijakan yang telah ada, termasuk produk perencanaan jangka menengah;

Identifikasi peraturan perundang-undangan (aspek legal) terkait;

Identifikasi dan analisis struktur organisasi penyelenggara pengembangan SPAM, termasuk tugas dan fungsinya;

Inventarisasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis, penyusunan dan pengambilan keputusan selama proses penyusunan KSDP-SPAM.

PERUMUSAN VISI DAN MISI

Visi dari Jakstra Pengembangan SPAM pada dasarnya merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan;

Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM (penyediaan air minum) selama 5 tahun mendatang di daerah yang bersangkutan.

Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;

Visi harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami;

Visi harus bersifat fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi;

Visi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah harus mendukung pencapaian visi daerah.

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Langkah ini merupakan langkah bagi Tim atau SKPD penyusun KSDP-SPAM untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu, permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang sekiranya akan dihadapi dalam rangka implementasi KSDP-SPAM nantinya;

Analisis dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi, baik pada lingkungan internal organisasi, maupun eksternal organisasi;

Inti dari langkah ini adalah untuk menemukan isu strategis, akar permasalahan, dan tantangan yang sekiranya dihadapi dalam melaksanakan pengembangan SPAM di daerah yang bersangkutan.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu artikulasi dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaitannya dengan isu dan persoalan (permasalahan) yang diidentifikasi terhadap pencapaian hasil kebijakan dan keputusan yang ditentukan (Dickey).

Sasaran adalah suatu keinginan yang diharapkan untuk dicapai merupakan spesifikasi dari tujuan meskipun tidak selalu harus diungkapkan secara kuantitatif (Dusseldorp).

Dari pengertian tersebut, perumusan sasaran diharapkan dapat menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya.

Dalam penentuan Tujuan dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi, serta berlaku pada periode Jasktra Pengembangan SPAM (periode 5 tahun/jangka menengah).

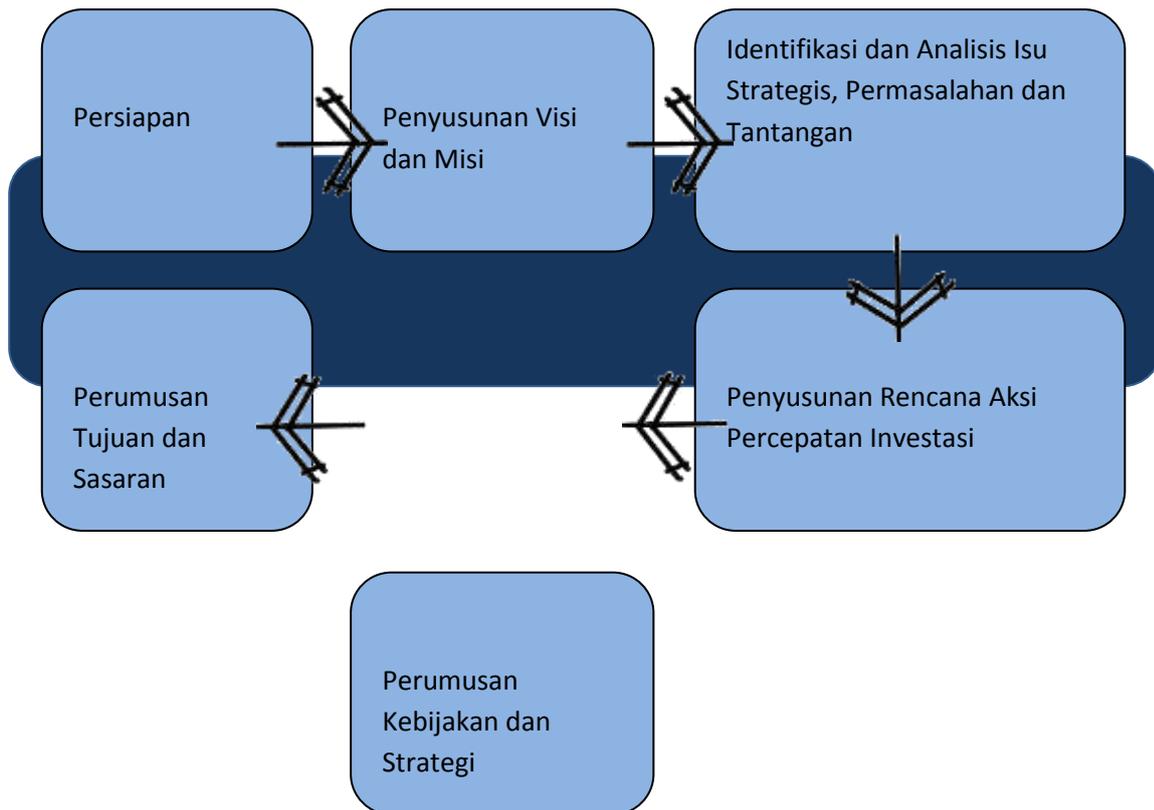
Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai paling kurang pada periode Jasktra Pengembangan SPAM.

Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana Jakstra Pengembangan SPAM.

Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka merealisasikan misi.

Pernyataan "Tujuan" pada umumnya relatif tidak dapat ditarik kejelasan dan keterincian, oleh karena itu "Sasaran" berfungsi untuk memperjelas maksud, rincian dan ukuran ketercapaian "Tujuan".

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS



Gambar 1.1 Metode Penyusunan KSDP-SPAM Kabupaten Banjar

Secara umum kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu jangka menengah serta mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.

Dengan demikian kebijakan dan strategi akan memuat langkah-langkah berupa penetapan program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak tersebut, yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pengembangan SPAM daerah.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kebijakan dan Strategis Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi latar belakang disusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Banjar, maksud dan tujuan, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan KSDP-SPAM, serta sistematika penulisannya.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Banjar.

BAB 3 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi tentang profil Kabupaten Banjar yang berhubungan dengan penyediaan air minum, Isu Strategis, Pemasalahan, dan Tantangan dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Banjar.

BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi tentang scenario penyelenggaraan SPAM, serta kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Banjar.

BAB 5 RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisi tentang Rencana Aksi Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.

BAB 6 PENUTUP

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

VISI PENGEMBANGAN SPAM

Visi Kabupaten Banjar:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri, dan Islami”

Visi Pengembangan SPAM:

“Terwujudnya Sistem Penyediaan Air Minum yang Andal, layak, dan Berkelanjutan menuju masyarakat Kabupaten Banjar yang Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Islami”.

MISI PENGEMBANGAN SPAM

Misi Penyediaan SPAM:

Pengelolaan dan perlindungan sumber air baku untuk kebutuhan air minum masyarakat.

Meningkatkan pengolahan kualitas air minum dan teknologi pengolahan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan.

Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Menyiapkan perangkat peraturan perundangan-undangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM.

TUJUAN PENGEMBANGAN SPAM

Tujuan Pengembangan SPAM:

Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dengan pengelolaan dan perlindungan sumber air baku yang berkualitas.

Terwujudnya kualitas air minum dan teknologi pengolahan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan.

Mewujudkan penambahan cakupan pelayanan air minum yang disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar.

Terwujudnya manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya.

Terwujudnya peran serta masyarakat secara aktif dalam memelihara sarana dan prasarana air minum dan ketersediaan sumber air baku.

Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dan terjangkau.

Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

SASARAN PENGEMBANGAN SPAM

Sasaran Pengembangan SPAM:

Peningkatan kondisi dan kualitas pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan.

Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi semakin menurun dari tahun ke tahun.

BAB 3

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PROFIL KABUPATEN BANJAR

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak pada 2° 49' 55" - 3° 43' 38" pada garis Lintang Selatan dan 114° 30' 20" hingga 115° 35' 37" pada Bujur Timur, dan

terbagi menjadi 19 Kecamatan, dengan 290 desa/kelurahan. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tapin;
 Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin
 Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru;
 Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru

Wilayah administrasi Kabupaten Banjar beserta batas administrasinya ditunjukkan pada Peta 2.1.

Luas Wilayah Kabupaten Banjar seluas + 4.668,5 km². Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur yaitu 29,99 Km² (0,64 %).

Tabel 3.1

Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	2	3	4	5
1	Aluh-Aluh	19	82,48	1,77
2	Beruntung Baru	12	61,42	1,32
3	Gambut	14	129,30	2,77
4	Kertak Hanyar	13	45,83	0,98
5	Tatah Makmur	13	35,47	0,76
6	Sungai Tabuk	21	147,30	3,16
7	Martapura	26	42,03	0,90
8	Martapura Timur	20	29,99	0,64
9	Martapura Barat	13	149,38	3,20
10	Astambul	22	216,50	4,64
11	Karang Intan	26	215,35	4,61
12	Aranio	12	1.166,35	24,98
13	Sungai Pinang	11	458,65	9,82
14	Paramasan	4	560,85	12,01

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	2	3	4	5
15	Pengaron	12	433,25	9,28
16	Sambung Makmur	7	134,65	2,88
17	Mataraman	15	148,40	3,18
18	Simpang Empat	26	453,30	9,71
19	Telaga Bauntung	4	158,00	3,38
Jumlah		290	4.668,50	100,00

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2015

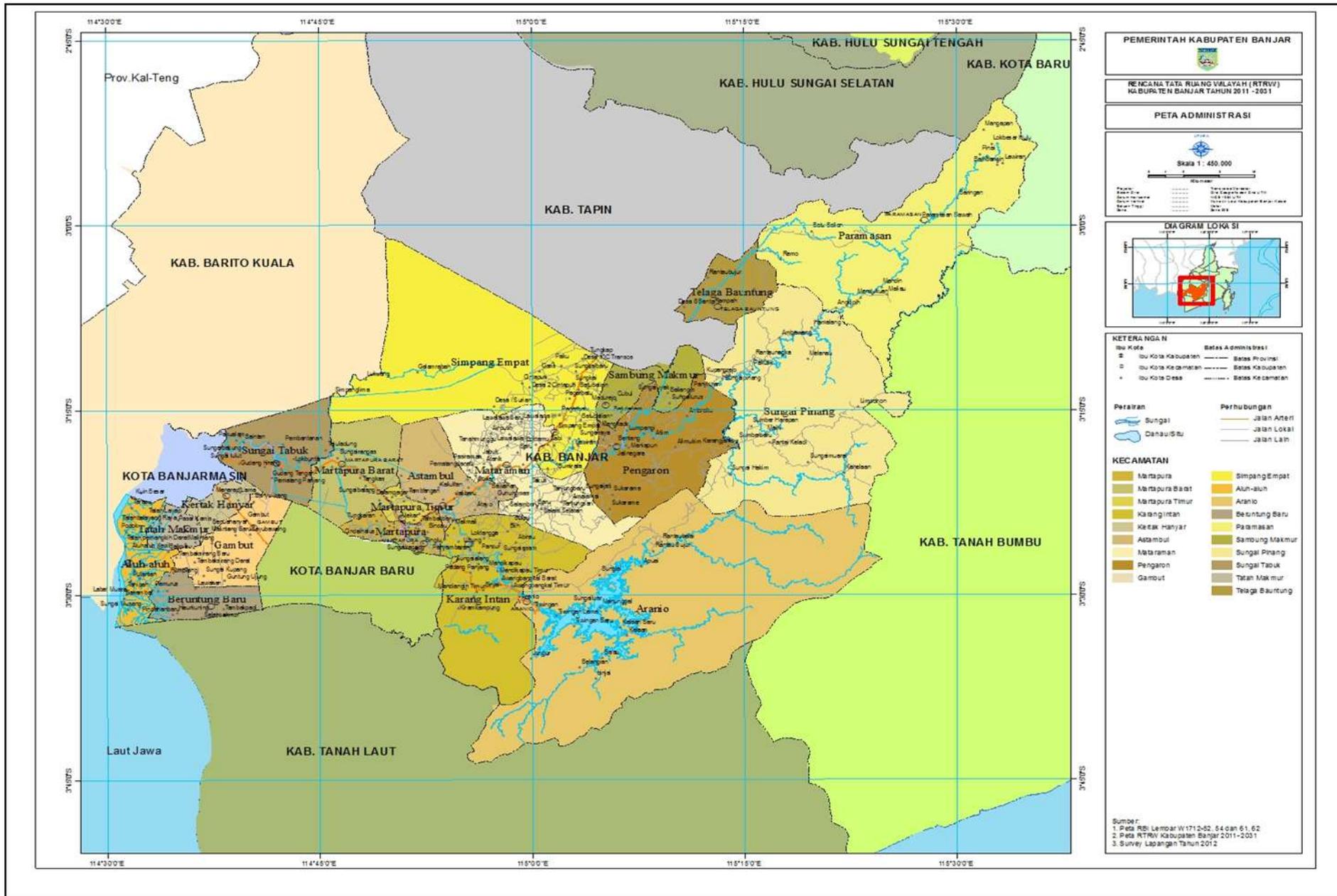
Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1	2	3	4	5	6
1	Aluh-Aluh	14.608	14.376	28.984	102
2	Beruntung Baru	6.937	7.408	13.985	98
3	Gambut	19.398	19.333	38.731	100
4	Kertak Hanyar	21.228	21.009	42.237	101
5	Tatah Makmur	5.996	5.851	11.847	102
6	Sungai Tabuk	30.535	29.920	60.455	102
7	Martapura	56.040	53.525	109.565	105
8	Martapura Timur	16.586	14.293	30.879	116
9	Martapura Barat	9.169	8.783	17.952	104
10	Astambul	17.590	17.498	35.088	101
11	Karang Intan	16.642	16.386	33.028	102
12	Aranio	4.539	4.360	8.899	104

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1	2	3	4	5	6
13	Sungai Pinang	8.319	7.604	15.923	109
14	Paramasan	2.484	2.375	4.859	105
15	Pengaron	8.569	8.454	17.023	101
16	Sambung Makmur	6.209	6.099	12.308	102
17	Mataraman	12.597	12.474	25.071	101
18	Simpang Empat	17.796	17.425	35.221	102
19	Telaga Bauntung	1.694	1.648	3.342	103
Jumlah		276.936	268.461	545.397	103

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Banjar, 2015



Berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, jumlah rumah tangga pada pertengahan tahun 2014 mencapai 146.767 rumah tangga, dengan jumlah penduduk 545.397 jiwa yang terdiri dari 276.936 laki-laki dan 268.461 perempuan, dengan ratio jenis kelamin 103. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Martapura dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi 2.607. Dibanding tahun sebelumnya, kecamatan Martapura mengalami kenaikan jumlah penduduk. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kepadatan penduduk, dimana pada tahun 2013, kepadatannya tercatat sebesar 2.557 penduduk per km². Kecamatan Aranio yang hanya 8 penduduk/km² merupakan daerah dengan tingkat kepadatan terendah.

Berdasarkan Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2015, keluarga fakir miskin terbesar berada di Kecamatan Karang Intan sebesar 3.377 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Martapura Barat sebesar 2 jiwa. Total keluarga miskin di Kabupaten Banjar Tahun 2015 sebesar 10.819 jiwa atau 1,98 % dari jumlah penduduk Kabupaten Banjar.

Data yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa produksi air minum pada tahun 2014 ada sebanyak 13,95 juta meter kubik. Dengan jumlah pelanggan air minum sebanyak 26.792 SR.

Pelanggan listrik yang tercatat pada PT. PLN Ranting Martapura berdasarkan Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2015 berjumlah 53.808 pelanggan dengan berbagai jenis tarif. KWH terjual dengan nilai mencapai 42,26 milyar rupiah dari pelanggan rumah tangga, 9,41 milyar rupiah dari pelanggan bisnis, 675 juta rupiah dari pelanggan industri, 2,59 miliar rupiah dari pelanggan perkantoran, 2,89 milyar rupiah dari pelanggan sosial, dan lainnya 3,93 milyar rupiah.

Total APBD rata-rata Kabupaten Banjar rata-rata (3 tahun terakhir) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

Total APBD Kabupaten Banjar TA.2015 Rp. 1.336.809.550.657,00

Total APBD Kabupaten Banjar TA.2014 Rp. 1.171.676.112.717,00

Total APBD Kabupaten Banjar TA.2013 Rp. 1.150.696.310.758,97

Total APBD Kabupaten Banjar TA.2012 Rp. 1.071.912.102.844,00

(sumber: DPKAD Kab. Banjar)

PDRB rata-rata pertahun dan laju pertumbuhan PDRB (3 tahun terakhir)

PDRB selama tahun 2013 Kabupaten Banjar mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 9.333 trilyun rupiah, yang jika dihitung dengan harga konstan hanya berjumlah 3.958 triliyun rupiah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tahun 2013 mencapai 4,8 persen.

PDRB selama tahun 2012 Kabupaten Banjar mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 8,611 trilyun rupiah, yang jika dihitung dengan harga konstan hanya berjumlah 3,777 triliyun rupiah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tahun 2012 mencapai 6,33 persen.

PDRB selama tahun 2011 Kabupaten Banjar mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 7,787 trilyun rupiah, yang jika dihitung dengan harga konstan hanya berjumlah 3,529 triliyun rupiah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tahun 2011 mencapai 5,34 persen. (sumber: KDA Kab. Banjar)

PROFIL AIR MINUM DI KABUPATEN BANJAR

Sistem Pelayanan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar menggunakan 2 sistem pelayanan yaitu Sistem Non Perpipaan dan sistem Perpipaan.

SISTEM PERPIPAAN

PDAM Intan Banjar sejak awal berdiri telah melayani sistem regional dan melayani di dua pemerintahan yaitu Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. PDAM Intan Banjar baru melayani 37,51% dari jumlah penduduk Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru yang terlayani sistem perpipaan PDAM.

Dari data yang diperoleh pada Bagian Perencanaan PDAM Intan Banjar, telah tercatat 41.925 sambungan rumah untuk melayani sebanyak 592.147 jiwa. PDAM Intan Banjar memiliki 11 sumber air baku, 12 instalasi pengolahan air dan 13 reservoir. Sumber air baku yang digunakan dalam sistem penyediaan air minum PDAM Intan Banjar adalah air permukaan (saluran irigasi Riam Kanan, Sungai Martapura dan Sungai Riam Kiwa) dan air tanah (sumur bor) yang pengambilanya dengan sistem perpompaan.

SUMBER AIR BAKU

Sumber air baku yang digunakan dalam sistem penyediaan air minum PDAM Intan Banjar adalah air permukaan (saluran irigasi Riam Kanan, Sungai Martapura dan Sungai Riam Kiwa) dan air tanah (sumur



bor) yang pengambilannya dengan sistem perpompaan.

Seperti pada umumnya, karakteristik air permukaan memiliki kualitas air yang jauh menyimpang dari kualitas air bersih sehingga memerlukan pengolahan dengan tingkat pengolahan yang diperlukan adalah pengolahan lengkap. Begitu pula dengan air tanah (sumur bor) pada beberapa titik sumur bor, kadar Fe dan Mn masih melebihi ambang batas untuk air bersih. Untuk mengurangi kadar Fe dan Mn yang terkandung pada air sumur bor, digunakan sistem pengolahan dengan proses aerasi.

Kondisi air permukaan (sumur bor dan sumur gali) dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan untuk wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terjadi karena kegiatan pertambangan pada wilayah bagian hulu yang merupakan daerah tangkapan air (catchment area) tidak terjaga kelestariannya sehingga siklus hidrologi tidak berjalan secara sempurna. Permasalahan air baku sangat terasa pada musim kemarau pada wilayah – wilayah tertentu akan kesulitan air bersih karena air yang diproduksi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan air bersih untuk kedepan juga akan lebih terasa dan semakin sulit jika melihat pertumbuhan penduduk dan tingkat hunian terus berkembang seiring dengan perpindahan pusat perkantoran pemerintahan di Banjarbaru.

Melihat kondisi dan permasalahan air baku pada saat ini, alternatif pengambilan air baku telah dilakukan PDAM Intan Banjar dengan melakukan survey pada sumber air baku Bendung Karang Intan Mandi Kapau dengan kapasitas debit yang tersedia 8 – 12 m³ dengan jarak ± 16 km dari tempat produksi IPA II Pinus. Pengambilan air baku di setiap lokasi menggunakan batuan pompa dalam proses pendistribusiannya. Air permukaan yang dijadikan sumber air baku oleh PDAM Intan Banjar yaitu:

Sungai Matapura

Sungai Martapura adalah anak sungai Barito yang merupakan sungai terpanjang di propinsi Kalimantan Selatan dengan panjang 70 km dan lebar 50 km, yang saat ini direncanakan untuk ditetapkan sebagai salah satu sumber air baku air minum dalam menyuplai kebutuhan air bersih kawasan regionalisasi Banjarmasin Raya.

Sungai Tabuk.

Sungai Tabuk dengan Daerah pengaliran Sungainya meliputi sebagian Kecamatan Sungai Tabuk, saat ini digunakan sebagai sumber air baku

air minum andalan oleh PDAM Bandarmasih dan IKK Sungai Tabuk PDAM Intan Banjar.

Secara kuantitas sangat berlimpah walaupun pada saat murim kemarau, namun dari sisi kualitas memiliki tingkat kekeruhan yang cukup tinggi di musim penghujan.

Sungai Riam Kiwa

Daerah Aliran Sungai untuk sungai Riam Kiwa seluas 191.132 Ha dengan panjang 60 km dan lebar 30 km yang melintasi Astambul sampai Belimbing di kecamatan Sungai Pinang. Secara kuantitas sangat berlimpah bila dijadikan sebagai sumber air baku air minum walaupun pada saat murim kemarau, namun dari sisi kualitas memiliki tingkat kekeruhan yang cukup tinggi di musim penghujan.

Sungai Riam Kanan.

Sungai Riam Kanan dengan waduknya untuk keperluan irigasi memiliki luas daerah aliran sungai sebesar 115.378 Ha yang juga merupakan daerah super prioritas untuk terus dikelola sehingga dapat meningkatkan resapan air guna kestabilan ketersediaan air. Untuk sumber air baku dari saluran irigasi Riam Kanan, secara kuantitas cukup tetapi program pembersihan gulma yang secara periodik dilakukan tiga bulan sekali oleh Dinas PU Bagian Pengairan dengan melakukan pengeringan air pada saluran irigasi sehingga produksi terganggu dan bahkan dapat terhenti karena tidak tersedianya air baku.

Tabel 3.3.

Sumber Air Baku PDAM Intan Banjar

No.	Instalasi	Sumber Air Baku
1	IPA I /STM	Irigasi Riam Kanan Sumur bor
2	IPA II/PINUS	Sungai Riam Kanan
3	IKK Astambul	Sungai Martapura
4	IKK Simpang Empat	Sungai Riam Kiwa
5	IKK Pengaron	Sungai Riam Kiwa

No.	Instalasi	Sumber Air Baku
6	IKK Tambak Sirang	Taping pipa dari transmisi air baku PDAM Bandarmasih
7	IKK Landasan Ulin	Sumur bor (5 buah)
8	IKK Sungai Tabuk	Sungai Martapura
9	IKK Karang Intan	Sungai Riam Kanan
10	IKK Dalam Pagar	Sungai Martapura
11	IKK Mataraman	Sungai Martapura
12	IKK Kertak Hanyar	Taping pipa dari transmisi air baku PDAM Bandarmasih

Sumber : RPIJM Cipta Karya Kabupaten Banjar Tahun 2013

UNIT PRODUKSI

Secara keseluruhan sistem penyediaan air minum Kabupaten Banjar yang menggabung menjadi satu dengan Kota Banjarbaru terdiri dari 10 unit produksi yang terbagi menjadi 2 kelompok. Sistem pengolahan terdiri dari 8 unit produksi dengan sistem pengolahan lengkap dan 2 unit dengan sistem pengolahan tidak lengkap (pengolahan sebagian). Sumber air baku dari sumur bor, dengan total kapasitas terpasang dari seluruh unit sebesar 407,5 lt/dtk.



Berikut gambaran kondisi masing-masing unit produksi di PDAM Intan Banjar:

Untuk Kota Martapura dilayani dari unit produksi BNA Banjarbaru IPA I STM dengan sumber air baku dari air tanah (sumur bor) dan kapasitas produksi 31 lt/dtk, sedangkan IPA II Pinus dengan sumber air baku dari saluran irigasi Riam Kanan dan kapasitas produksi 149 lt/dtk. Daerah pelayanan dari unit produksi IPA I dan IPA II selanjutnya didistribusikan

dengan sistem perpompaan ke konsumen yang terbagi di beberapa wilayah pelayanan salah satunya Kota Martapura Kabupaten Banjar.

Unit produksi Cabang I Ladasan Ulin dengan sumber air baku dari air tanah (sumur bor) dengan kapasitas produksi 59,3 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Unit produksi Cabang II Kertak Hanyar dengan sumber air baku dari Taping pipa dari transmisi air baku PDAM Bandarmasih dengan kapasitas produksi 32,81 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Kertak Hanyar dan sebagian daerah Kecamatan Gambut di Kabupaten Banjar.

Unit produksi IKK Sungai Tabuk dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Martapura dengan kapasitas produksi 11,17 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi wilayah Sei Tabuk Kabupaten Banjar dan Martapura Barat.

Unit produksi Cabang II Tambak Sirang dengan sumber air baku dari Taping pipa dari transmisi air baku PDAM Bandarmasih dengan kapasitas produksi 9,01 lt/dtk dari kapasitas terpasang 40 lt/dt dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Kertak Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru dan sebagian daerah kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Unit produksi IKK Astambul dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Martapura dengan kapasitas produksi 7 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Unit produksi IKK Mataraman dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Martapura dengan kapasitas produksi 9 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.

Unit produksi IKK Simpang Empat dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Riam Kiwa dengan kapasitas produksi 4 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Unit produksi IKK Pengaron dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Riam Kiwa dengan kapasitas produksi 5 lt/dtk dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.

Unit produksi IKK Karang Intan dengan sumber air baku dari air permukaan Sungai Riam Kanan dengan kapasitas produksi 4,8 lt/dtk

dan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Tabel 3.4.

Instalasi Pengolahan Air PDAM Intan Banjar

No	Instalasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (lt/dt)	Kapasitas Produksi (lt/dt)	Pemanfaatan Produktifitas Instalasi Produksi (%)
1	IPA I /STM	Sumur Dalam	60	21	35
2	IPA II/PINUS	Air Permukaan	170	149	87,65
3	IKK Astambul	Air Permukaan	10	7	70
4	IKK Simpang Empat	Air Permukaan	5	4	80
5	IKK Pengaron	Air Permukaan	5	5	100
6	IKK Tambak Sirang	Taping pipa dari transmisi air baku PDAM Bandarmasih	40	9,01	22,53
7	IKK Landasan Ulin	Sumur Dalam	80	59,30	74,13
8	IKK Sungai Tabuk	Air Permukaan	20	11,17	55,85
9	IKK Karang Intan	Air Permukaan	5	4,8	96
10	IKK Dalam Pagar	Air Permukaan	2,5	0	0
11	IKK Mataraman	Air Permukaan	20	9	45
12	IKK Kertak Hanyar	Taping pipa dari transmisi air baku PDAM	40	32,81	82,03

No	Instalasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (lt/dt)	Kapasitas Produksi (lt/dt)	Pemanfaatan Produktifitas Instalasi Produksi (%)
		Bandarmasih			

Sumber : RPIJM Cipta Karya Kabupaten Banjar Tahun 2013

RESERVOIR

Untuk menampung air bersih setelah melalui proses pengolahan dan untuk menyediakan saat kebutuhan maksimal, setiap unit produksi dilengkapi dengan reservoir dengan berbagai macam ukuran. Lokasi dan ukuran reservoir masing-masing produksi adalah:

Tabel 3.5.

Jumlah dan Kapasitas Reservoir PDAM Intan Banjar

No.	Lokasi	Kapasitas (m3)	Jumlah (unit)
1	IPA I STM Aerator	1400 (Total)	3
2	IPA II Pinus	200 200 500 2000	4
3	Unit karang Intan	50	1
4	Booster Muslimin	1000	1
5	Booster GT. Manggis	200	1
6	Cabang I Ladasan Ulin & Gambut	2000 160 500	3
7	Cabang II Kertak Hanyar	200	2

No.	Lokasi	Kapasitas (m3)	Jumlah (unit)
		200	
8	Cabang II Sungai Tabuk	100	1
9	Booster Tambak Sirang	1000	1
10	Cabang III Astambul	50	1
11	Cabang III Mataraman	50	1
12	Cabang III Simpang Empat	50	1
13	Cabang III Pengaron	50	1

Sumber : RPIJM Cipta Karya Kabupaten Banjar Tahun 2013

SISTEM DISTRIBUSI

Dalam upaya pendistribusian air minum yang telah terolah dan tertampung dalam reservoir yang ada ke masing-masing daerah pelayanan, dilakukan melalui sistem perpompaan yang selanjutnya debit air yang didistribusikan seharusnya dapat tercatat melalui water meter induk yang terpasang.



Namun karena kondisi water meter induk mengalami kerusakan maka pencatatan debit air yang terdistribusikan tidak dapat dicatat sesuai dengan angka yang sebenarnya.

Upaya pemerataan tekanan dengan pembuatan booster pump yang ditempatkan di wilayah yang mempunyai tekanan minimum dan pembentukan zona – zona distric meter area dalam upaya optimalisasi pelayanan serta mengurangi kebocoran. Dengan upaya yang terus dilakukan diharapkan dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas



dapat terpenuhi. Masih adanya perpipaan primer atau pipa jaringan utama yang terbuat dari bahan ACP, pipa yang melebihi umur teknis dan jaringan perpipaan yang berlokasi pada badan jalan menjadi hambatan dalam pelayanan karena apabila terjadi kebocoran dalam penanganannya memerlukan waktu yang lama. Kondisi perpompaan yang usianya diatas 10 tahun dan efisiennya telah menurun karena sudah tidak sesuai dengan debit yang harus didistribusikan, semakin bertambahnya cakupan pelayanan dan tekanan yang harus disediakan sampai ke ujung jaringan pelanggan yang terjauh dari sistem pelayanan.

Penempatan sistem perpipaan masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan. Masih banyak ruas jalan yang belum terjangkau jaringan perpipaan sehingga menjadi beban yang tinggi kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan air bersih dari PDAM.

AIR BERSIH NON PERPIPAAN

Secara umum, masyarakat Kabupaten Banjar memenuhi kebutuhan airnya diperoleh dari sistem perpipaan (PDAM Intan Banjar) dan sistem non perpipaan yang dikelola langsung oleh individu rumah tangga masyarakat. System non perpipaan yang dilakukan di Kabupaten Banjar meliputi kegiatan Pembuatan sumur gali, PMA (Penangkap Mata Air), Sumur Bor, SIPAS (Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana). Saat ini Sistem Non Perppipaan di Kabupaten Banjar sudah dapat melayani masyarakat Kabupaten Banjar sebesar 4% (DAK) dan 6,8% (Pamsimas) sehingga jumlah cakupan pelayan yang telah dilakukan adalah 10,8%.

SUMUR GALI ATAU SUMUR POMPA

Potensi air tanah dangkal di Kabupaten Banjar pada dasarnya cukup tersedia sehingga banyak masyarakat memanfaatkan air tanah dangkal ini dengan konstruksi sumur gali atau sumur pompa. Permasalahannya adalah kontinuitasnya terganggu pada saat musim kemarau. Permasalahan lainnya adalah mengenai kualitasnya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dari air, tanah dan udara yang tercemar sehingga membahayakan terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, konstrusi sumur juga berpengaruh terhadap keamanan sumber air tanah dangkal ini. Berdasarkan data dari Subdin Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan kabupaten Banjar tahun 2008, mengenai hasil pemeriksaan kualitas air tanah dangkal, jumlah sumur yang tidak memenuhi syarat bakteriologis mencapai 30%. Ini memberikan gambaran belum amannya penggunaan air tanah dangkal bagi kesehatan masyarakat sehingga perlu tindakan perbaikan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Banjar ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Jumlah Sumur Gali di Kabupaten Banjar 2007-2015

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1	2007	Desa Cintapuri, Kecamatan Simpang Empat	5
TOTAL 2007			5
1	2008	Desa Bawahan Seberana, Kec Mataraman	8
2	2008	Desa Sungai Asem, Kec. Karang Intan	1
3	2008	Desa Makmur Karya, Kec. Simpang Empat	1
TOTAL 2008			10
1	2009	Desa Tanah Abang, Kec. Mataraman	1
2	2009	Desa Mangkalawat, Kec. Mataraman	1
TOTAL 2009			2
1	2010	Desa Pesayangan Selatan, Kec. Martapura	15
2	2010	Desa Pesayangan Barat/Utara	15
3	2010	Desa Bawahan Pasar, Kec. Mataraman	1
4	2010	Desa Pematang Danau, Kec. Mataraman	1
5	2010	Desa Bawahan Selan, Kec. Mataraman	1
TOTAL 2010			33
1	2011	Desa Sungai jati, Kec. Mataraman	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
2	2011	Desa Kertak Empat, Kec. Pengaron	1
3	2011	Desa Lobang Baru, Kec. Pengaron	1
4	2011	Desa Rantau Bujur, Kec Aranio	1
5	2011	Desa Pesayangan Selatan, Kec. Martapura	1
6	2011	Kelurahan Jawa, Kec. Martapura	1
TOTAL 2011			6
1	2012	Desa Cinta Puri, Kec. Simpang Empat	1
2	2012	Desa Balau, Kec. Simpang Empat	1
3	2012	Desa Sei. Besar Kec. Karang Intan	1
4	2012	Desa Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur	1
5	2012	Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan	1
6	2012	Desa Sei Lurus, Kec Sambung Makmur	1
TOTAL 2012			6
1	2013	-	
TOTAL 2013			-
1	2014	-	
TOTAL 2014			-
1	2015	Desa Astambul, Kec. Astambul	1
TOTAL 2015			1
JUMLAH TOTAL			63

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan AMPL Seksi Pengembangan Air Minum Kabupaten Banjar, 2015

Tabel 3.7

Jumlah Sumur Pompa di Kabupaten Banjar 2007-2015

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1	2007	Desa Simpang Warga Kec. Aluh-Aluh	1
2	2007	Desa Kuin, Kec. Aluh-Aluh	1
3	2007	Desa Kuin Besar, Kec. Aluh-Aluh	1
4	2007	Desa Belimau, Kec. Aluh-Aluh	1
5	2007	Desa Pondok, Kec. Aluh-Aluh	1
6	2007	Desa Handil Bujur, Kec. Aluh-Aluh	1
7	2007	Desa Rumplang, Kec. Beruntung Baru	1
8	2007	Desa Selat Makmur, Kec. Beruntung Baru	1
9	2007	Desa Tambak Padi, Kec. Beruntung Baru	1
10	2007	Desa Kampung Baru, Kec. Beruntung Baru	1
11	2007	Desa pindahan baru, Kec. Beruntung Baru	1
12	2007	Desa Haur Kuning, Kec. Beruntung Baru	1
13	2007	Desa Tampang Awang, Kec. Kertak Hanyar	1
14	2007	Desa Pemangkih Darat, Kec. Kertak Hanyar	1
15	2007	Desa Banyu Irang, Kec. Sungai Tabuk	1
TOTAL 2007			15
1	2008	Desa Malintang, Kec. Gambut	2
2	2008	Desa Madurejo, kec. Sambung Makmur	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
TOTAL 2008			3
1	2009	-	-
TOTAL 2009			-
1	2010	-	-
TOTAL 2010			-
1	2011	Kelurahan Pesayangan, Kec. Martapura Kota	2
TOTAL 2011			2
1	2012	-	-
TOTAL 2012			-
1	2013	-	-
TOTAL 2013			-
1	2014	-	-
TOTAL 2014			-
1	2015	-	-
TOTAL 2015			-
JUMLAH TOTAL			20

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan AMPL Seksi Pengembangan Air Minum Kabupaten Banjar, 2015

SUMUR BOR

Secara umum, sistem non perpipaan masih menjadi andalan sebagai sumber air penduduk. Sedikitnya, 50% penduduk masih menggunakan sistem non perpipaan ini. Sumur gali dan sumur pompa menjadi sumber utama sistem non perpipaan terutama untuk kegiatan mandi, cuci dan kakus. Sebanyak 30% nya masih tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga memerlukan tindakan perbaikan.

Tabel 3.8

Jumlah Sumur Bor di Kabupaten Banjar 2007-2015

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1	2007	Desa Kampung Baru	1
2	2007	Desa Tatah Jeruju, Kecamatan Tatah Makmur	1
3	2007	Desa Akar Begantung	3
4	2007	Desa Pematang Hambawang	3
5	2007	Desa Pematang Baru	1
6	2007	Kelurahan Gambut	1
7	2007	Desa Bawahan Selan	1
8	2007	Desa Pematang Danau, Kec Astambul	1
9	2007	Desa Bincau, Kec Martapura Kota	1
10	2007	Desa Handil Purai, Kec Beruntung Baru	1
TOTAL 2007			14
1	2008	Desa Pematang Danau	1
2	2008	Desa Kelampaian	2
3	2008	Desa Balau, karang Intan	1
4	2008	Desa P. Nyiur, Karang Intan	1
TOTAL 2008			5
1	2009	Desa Kelampaian Ilir, Astambul	4
2	2009	Desa Munggu Raya. Kec Astambul	1
3	2009	Desa Bawahan Seberang, Kec. Mataraman	1
4	2009	Desa Pasiraman, Kec. Mataraman	1
5	2009	Desa Lok Tamu, Kec. Mataraman	1
6	2009	Desa Mandiangin Barat, kec. Karang Intan	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
TOTAL 2009			9
1	2010	Desa Gambut, Kec. Gambut	1
2	2010	Desa Berkat Mulia, Kec. Simpang empat	1
3	2010	Desa Surian, Kec. Simpang Empat	1
4	2010	Desa Bawahan Selan, Kec. Mataraman	1
5	2010	Desa Banua Hanyar, Kec. Simpang Empat	1
6	2010	Desa Biih, Kec. Karang Intan	1
7	2010	DesaMandi Kapau Timur, Kec. Karang Intan	1
TOTAL 2010			7
1	2011	Desa Pasiraman, Mataraman	1
2	2011	Desa Makmur, Kec. Gambut	1
3	2011	Desa Pejambuan, Kec. Sei Tabuk	1
4	2011	Desa Tunggul Irang, Kec. Martapura	1
5	2011	Desa Jawa Laut, Kec. Martapura	1
6	2011	Desa Bincau, Kec. Martapura	1
7	2011	Kelurahan Keraton, Kec. Martapura	1
8	2011	Desa Indrasari, Kec Martapura	1
9	2011	Desa Munggu Raya, Kec Astambul	1
10	2011	Desa Lok Cantung, Kec. Simpang Empat	1
TOTAL 2011			10
1	2012	Desa Batung Cindai Alus, Kec. Martapura Kota	1
2	2012	Desa Tambangan, Kec. Astambul	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
3	2012	Desa Tambak Hanyar, Kec. Martapura	1
4	2012	Desa Kalampayan, Astambul	1
5	2012	Desa Tambak Dananu, Kec. Astambul	1
6	2012	Desa Lok Gabang, Kec Astambul	1
7	2012	Desa Kelampaian Ilir, Kec. Astambul	1
8	2012	Desa Gambut, Kec. Gambut	1
9	2012	Desa Makmur, Kec. Gambut	1
10	2012	Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan	1
11	2012	Desa Banua Anyar, Kec Astambul	1
12	2012	Desa Tanah Intan, Kec. Simpang Empat	1
13	2012	Kelurahan Pesayangan, Kec. Martapura	1
14	2012	Desa Tunggul Irang, Kec. Martapura	1
15	2012	Kelurahan Murung Keraton, Kec Martapura	1
16	2012	Desa Tunggul Irang Ilir, Kec. Martapura	1
17	2012	Desa Tunggul Irang Ulu, Kec. Martapura	1
18	2012	Desa Pesayangan Utara, Kec. Martapura	1
TOTAL 2012			18
1	2013	-	
TOTAL 2013			-
1	2014	-	
TOTAL 2014			-
1	2015	TPA Padang Panjang, Kec. Karang Intan	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
2	2015	Desa Tambak Anyar, Kec. Martapura Timur	1
3	2015	Desa Lok. Cantung Kec. Simpang Empat	1
4	2015	Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat	1
5	2015	Desa Berkat Mulia Kec. Simpang Empat	1
TOTAL 2015			5
JUMLAH TOTAL			68

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan AMPL Seksi Pengembangan Air Minum Kabupaten Banjar, 2015

PENANGKAP MATA AIR (PMA)

Mata air banyak dipakai sebagai sumber air baku untuk sistem penyediaan air bersih, karena kualitasnya relatif lebih baik dari air permukaan, sehingga pengolahan yang digunakan tidak terlalu rumit. Untuk bisa memanfaatkan mata air, dibuat suatu bangunan penangkap air yang biasanya dinamakan "Bronkaptering atau Spring Capture". Di Kabupaten Banjar pembangunan PMA ini tersebar di berbagai kecamatan dengan jumlah PMA sebanyak 45 buah yang terdiri dari PMA Gravitasi dan Non Gravitasi.

Tabel 3.9

Jumlah PMA di Kabupaten Banjar Tahun 2007-2015

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1	2007	Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang	1
2	2007	Desa Remo, Kec. Paramasan	1
3	2007	Desa Takuti, Kec. Mataraman	1
4	2007	Desa Gunung Ulin, Kec. Mataraman	1
TOTAL 2007			4

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1	2008	Desa Banua Riam, Kec Aranio	1
2	2008	Desa Sei. Pinang, Kec. Sungai Pinang	1
3	2008	Desa Belimbing Lama, Kec. Sungai Pinang	1
4	2008	Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur	1
5	2008	Desa Paramasan Bawah, Kec Paramasan	1
6	2008	Desa Kupangrejo, Kec. Sei Pinang	1
7	2008	Desa Baru, Kec. Martaraman	1
8	2008	Desa Pa"au Kec. Aranio	1
TOTAL 2008			8
1	2009	Desa Baru, Kec. Mataraman	1
2	2009	Desa Takuti, Kec. Mataraman	1
3	2009	Desa Tiwingan Lama, Kec. Aranio	1
4	2009	Desa Gunung Ulin, Kec. Mataraman	1
5	2009	Desa Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan	1
6	2009	Desa Awang Bangkal Timur, Kec. Karang Intan	1
7	2009	Desa Aranio, Kec. Aranio	1
TOTAL 2009			7
1	2010	Desa Sumber Harapan, Kec. Sei Pinang	1
2	2010	Desa Sumber Baru, Kec. Sei Pinang	1
3	2010	Desa Kahelaan, Kec. Sei Pinang	1
4	2010	Desa Bawahan Selan, Kec.	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
		Mataraman	
5	2010	Desa Mandi Kapau Barat, Kec. Karang Intan	1
TOTAL 2010			5
1	2011	Desa Sungai jati, Kec. Mataraman	1
2	2011	Desa Penyiuran, Kec. Pengaron	1
3	2011	Desa Kertak Empat, Kec. Pengaron	1
4	2011	Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat	2
5	2011	Desa Sungai Langsung, Kec. Simpang Empat	1
6	2011	Desa Rantau Bujur, Kec Aranio	1
7	2011	Desa Artain , Kec Aranio	1
8	2011	Desa Tiwingan Baru, Kec Aranio	1
TOTAL 2011			9
1	2012	Desa Cinta Puri, Kec. Simpang Empat	1
2	2012	Desa Balau, Kec. Simpang Empat	1
3	2012	Desa Sei. Besar Kec. Karang Intan	1
4	2012	Desa Sei Lurus, Kec Sambung Makmur	1
5	2012	Desa Keramat Mina, Kec. Simpang Empat	1
6	2012	Desa Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur	1
7	2012	Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan	1
8	2012	Desa Sungai Alang, Kec. Karang Intan	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
9	2012	Desa Sungai Landas, Kec. Karang Intan	1
TOTAL 2012			9
1	2013	-	
TOTAL 2013			-
1	2014	Desa Paramasan, Kec. Paramasan	1
2	2014	Desa Tiwingan Baru, Kec. Aranio	1
3	2014	Desa Kalaan, Kec. Aranio	1
TOTAL 2014			3
1	2015	-	
TOTAL 2015			-
JUMLAH TOTAL			45

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan AMPL Seksi Pengembangan Air Minum Kabupaten Banjar, 2015

SISTEM INSTALASI PENGOLAHAN AIR SEDERHANA (SIPAS)

Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana merupakan system yang mampu mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum. Sumber air baku yang digunakan merupakan air permukaan. Jumlah SIPAS yang terdapat di Kabupaten Banjar dari Tahun 2008-2012 berjumlah 13 buah.

Tabel 3.10

Jumlah SIPAS di Kabupaten Banjar Tahun 2008-2015

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1	2008	Desa Tajau Landung, Kec. Sei Tabuk	1
2	2008	Desa Lok Buntar, Kec. Lok Buntar	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
3	2008	Desa Empat, Kec. Simpang Empat	1
4	2008	Desa Sei. Rangkas Hambuku, Kec. Martapura Barat	1
5	2008	Desa Salat Makmur, Kec. Beruntung Baru	1
6	2008	Desa Paku Alam, Kec. Sei Tabuk	1
TOTAL 2008			6
1	2009	Desa Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat	1
2	2009	Desa Pingaran Ulu, Kec Astambul	1
3	2009	Desa Sungai Arfat, Kec. Karang Intan	1
TOTAL 2009			3
1	2010	Desa Garis Hanyar, Kec. Simpang Empat	1
2	2010	Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur	2
TOTAL 2010			3
1	2011	Desa Keliling Benteng Tengah, Kec. Martapura Barat	1
2	2011	Desa Lok Buntar, Kec. Sei Tabuk	1
3	2011	Desa, Sungai Pinang Lama, Kec. Sei Tabuk	1
4	2011	Desa Munggu Raya, Kec Astambul	1
5	2011	Desa Mandiangin Barat, Kec. Karang Intan	2
6	2011	Desa Keramat Baru, Kec. Martapura Timur	1
7	2011	Pasayangan	2
8	2011	Desa Sungkai, Kec. Simpang empat	1
9	2011	Desa Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur	2
10	2011	Desa Padang Panjang, Kec. Karang Intan	1
11	2011	Desa Antasan Senior Ilir, Kec. Martapura	4

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
		Timur	
12	2011	Desa Mandikapau Timur, Kec. Karang Intan	1
13	2011	Desa Pulau Nyiur, Kec. Karang Intan	1
14	2011	Desa Sungai Alang, Kec Karang Intan	1
TOTAL 2011			20
1	2012	Desa Tandipah, Kec. Sei Tabuk	1
2	2012	Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat	1
3	2012	Desa Lawiran, Kec. Simpang Empat	1
4	2012	Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat	1
5	2012	Desa Tambangan, Kec. Astambul	2
6	2012	Desa Padang Panjang, Kec. Karang Intan	1
7	2012	Desa Awang Bangkal Barat, Kec Karang Intan	1
8	2012	Desa Mandiingin Barat, Kec. Karang Intan	1
TOTAL 2012			9
1	2013	Desa Biih, Kec. Karang Intan	1
2	2013	Desa Sungkai, Kec Simpang Empat	2
3	2013	Desa Pigaran ulu, Kec. Astambul	1
4	2013	Desa Keliling Benteng Tengah, Kec. Martapura Timur	1
TOTAL 2013			5
1	2014	Desa Makmur Karya, Kec. Cinta Puri	1
2	2014	Desa Sumber Sari, Kec. Cinta Puri	1
3	2014	Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat	1

NO	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
TOTAL 2014			3
1	2015	Desa Keliling Benteng Tengah, Kec. Martapura Barat	1
2	2015	Desa Telok Selong Ulu, Kec. Martapura Barat	1
TOTAL 2015			2
JUMLAH TOTAL			51

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan AMPL Seksi Pengembangan Air Minum Kabupaten Banjar, 2015

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Perkembangan Program Pamsimas di Kabupaten Banjar Tahun 2008-2014

TAHUN	NO	KECAMATAN	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
2008	1	Sei Pinang	Kupangrejo	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	2	Mataraman	Baru	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	3	Simpang Empat	Desa Empat	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	4	Karang Intan	Sungai Asem	Sumur Gali (SGL)
	5	Aranio	Pa'au	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	6	Martapura Barat	Sei. Rangas Hambuku	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)

TAHUN	NO	KECAMATAN	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
	7	Beruntung Baru	Salat Makmur	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	8	Simpang Empat	Makmur Karya	Sumur Gali (SGL)
	9	Sei Tabuk	Paku Alam	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
2009	1	Simpang Empat	Sungkai Baru	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	2	Mataraman	Tanah Abang	Sumur Gali (SGL)
	3	Mataraman	Gunung Ulin	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	4	Mataraman	Bawah Seberang	Sumur Bor
	5	Mataraman	Mangkalawat	Sumur Gali (SGL)
	6	Mataraman	Takuti	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	7	Mataraman	Pasiraman	Sumur Bor
	8	Mataraman	Lok Tamu	Sumur Bor
	9	Astambul	Pingaran Ulu	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	10	Karang Intan	Awang Bangkal Barat	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	11	Karang Intan	Awang Bangkal Timur	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	12	Karang Intan	Abirau	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	13	Karang Intan	Mandiingin Barat	Sumur Bor
	14	Aranio	Aranio	Penangkap Mata Air (PMA)

TAH UN	N O	KECAMATA N	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
	4			Gravitasi
	1 5	Aranio	Tiwingan Lama	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
2010	1	Sei Pinang	Sumber Harapan	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	2	Sei Pinang	Sumber Baru	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	3	Sei Pinang	Kahelaan	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	4	Simpang Empat	Berkat Mulia	Sumur Bor
	5	Simpang Empat	Garis Hanyar	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	6	Mataraman	Bawahan Pasar	Sumur Gali (SGL)
	7	Mataraman	Pematang Danau	Sumur Gali (SGL)
	8	Mataraman	Surian	Sumur Bor
	9	Mataraman	Bawahan Selan	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi, Sumur Gali, Rehab Sumur Bor
	1 0	Astambul	Banua Anyar	Sumur Bor
	1 1	Karang Intan	Mandi Kapau barat	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	1 2	Karang Intan	Biih	Sumur Bor
	1 3	Karang Intan	Mandai Kapau Timur	Sumur Bor
2011	1	Maratapura Barat	keliling benteng Tengah	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)

TAH UN	N O	KECAMATA N	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
	2	Mataraman	Sungai Jati	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi dan Sumur Gali
	3	Pengaron	Penyiuran	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi
	4	Pengaron	Kertak Empat	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi/Sumur
	5	Pengaron	Lobang Baru	Sumur Gali (SGL)
	6	Sei Tabuk	Pejambuan	Sumur Bor
	7	Sei Tabuk	Lok Buntar	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	8	Sei Tabuk	Sungai Pinang Lama	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	9	Simpang Empat	Sungkai	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi
	1 0	Simpang Empat	Lokcantung	Sumur Bor
	1 1	Simpang Empat	Sungai Langsung	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi
	1 2	Aranio	Rantau Bujur	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi/Sumur
	1 3	Aranio	Artain	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	1 4	Aranio	Tiwingan Baru	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi
	1 5	Astambul	Munggu Raya	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)
	1 6	Astambul	Munggu Raya	Sumur Bor
2012	1	Simpang Empat	Cinta Puri	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi dan Sumur Gali

TAH UN	N O	KECAMATA N	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
	2	Simpang Empat	Balau	Penangkap Mata Air (PMA) Gravitasi dan Sumur Gali
	3	Karang Intan	Sei Besar	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi dan Sumur Gali
	4	Sei Tabuk	Tandipah	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS, Sumber Sungai)
	5	Martapura Barat	Keliling benteng Ulu	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS, Sumber Sungai)
	6	Simpang Empat	Lawiran	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS, Sumber Sungai)
	7	Sambung Makmur	Sei Lurus	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi dan Sumur Gali
	8	Karang Intan	Mandiingin timur	Sumur Bor
	9	Astambul	Banua Anyar ST	Sumur Bor
	10	Simpang Empat	Keramat Mina	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi (Sumber Air Danau)
	11	Simpang Empat	Tanah Intan	Sumur Bor
	12	Sambung Makmur	Batu Tanam	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi/Sumur Gali
	13	Karang Intan	Penyambaran	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi/Sumur gali
	14	Karang Intan	Sungai Alang	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi (Sumber Air Saluran Irigasi)
	15	Karang Intan	Sungai Landas	Penangkap Mata Air (PMA) Non Gravitasi (Sumber Air Saluran Irigasi)

TAH UN	N O	KECAMATA N	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
2013	1	Karang Intan	Pulau Nyiur	Penangkap Mata Air (PMA), Menara Air
	2	Astambul	Kelampaian Tengah	Menara Air
	3	Sungai Pinang	Belimbing Lama	Penangkap Mata Air (PMA)
	4	Sungai Pinang	Hakim Makmur	Menara Air, Penangkap Mata Air (PMA)
	5	Pengaron	Lok Tunggul	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS, Sumber Sungai)
	6	Pengaron	Antaraku	Penangkap Mata Air (PMA), Menara Air, Kran Umum (KU)
	7	Sambung Makmur	Madurejo	Menara Air
	8	Sambung Makmur	Bali Angin	Menara Air, Kran Umum
	9	Sambung Makmur	Pasar Baru	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), Menara Air
	10	Sambung Makmur	Batang Banyu	Non Gravitasi/Sumur Gali, Menara Air
	11	Martapura Barat	Sungai Rangas	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), Menara Air
2014	1	Sungai Tabuk	Sungai Bakung	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), Menara Air
	2	Sungai Tabuk	Keliling Benteng Ilir	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), Menara Air
	3	Sungai Tabuk	Tajau Landung	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), Menara Air
	4	Pengaron	Ati'im	Penangkap Mata Air (PMA)
	5	Pengaron	Mangkauk	Penangkap Mata Air (PMA), Menara

TAHUN	NO	KECAMATAN	DESA	SARANA YANG DIBANGUN
				Air
	6	Karang Intan	Mandiingin Timur	Sumur Bor, Menara Air, Bendung dan Penangkap Air
	7	Karang Intan	Mandi Kapau Timur	Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), Menara Air, SUMur Gali

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan AMPL Seksi Pengembangan Air Minum Kabupaten Banjar, 2015

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

Peningkatan akses air minum;

Penyelenggaraan pendanaan;

Peningkatan kapasitas kelembagaan;

Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan;

Pemenuhan kebutuhan air baku;

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan

Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

AKSES AMAN PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

Masih minimnya pengembangan sarana dan prasarana pengolahan air minum sampai dengan akhir tahun 2014 berupa sambungan rumah (SR) sebanyak 30.409 kk/unit sedangkan jumlah penduduk 536.329 jiwa.

Cakupan pelayanan (%) melalui perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi serta JP dan BJP tidak terlindungi (data BPS terakhir yang ada): 50,16 % terdiri atas perpipaan 28,35 %, BJP sebesar 21,81 % (Sumber: Laporan SPM Disperkim Tahun 2014).

Pertumbuhan (%) cakupan pelayanan melalui SPAM perpipaan dan BJP terlindungi per tahun:

Pada Akhir tahun 2013 jumlah penduduk 527.997 jiwa dan Jumlah SR (Sambungan Rumah) sebanyak 23.231 kk dan bukan jaringan perpipaan (BJP) = 19.778 kk

Pada Akhir tahun 2014 jumlah penduduk 536.329 jiwa dan Jumlah SR (Sambungan Rumah) sebanyak 30.409 kk dan bukan jaringan perpipaan (BJP) = 23.394 kk.

Dengan Asumsi 5 orang/KK asumsi cakupan pelayanan (JP) : 6,35 %

Dengan Asumsi 5 orang/KK didapatkan asumsi cakupan pelayanan (BJP): 3,08%

Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat kurang memadai, namun kerjasama antar instansi Dinas Perumahan dan Permukiman selaku pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Air Minum dan Dinas Kesehatan belum ada koordinasi dengan baik perihal penyelenggaraan SPAM BJP.

Angka prevalensi penyakit yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman, masih tinggi, yaitu prevalensi diare 9% (angka nasional 2007), data dari Dinas Kesehatan penduduk kasus diare berjumlah 11.872 jiwa dan yang tertangani di Kabupaten Banjar tahun 2014 ada 10.425 jiwa. Angka prevalensi diare Kabupaten Banjar sebesar 2,14 %. (sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2014).

Jumlah penderita penyakit (rata-rata pertahun) akibat kurang baiknya pelayanan air minum (angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum): 11.872 kasus dan yang tertangani 10.425 kasus (Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2014).

PENGEMBANGAN PENDANAAN

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah.

Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal.

Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah.

Harga tarif air sudah di atas harga pokok produksi

Tarif Rata-Rata Air tahun 2014 (audit) = 8.134,90

Harga Pokok Air tahun 2014 (audit) = 7.931,55

Perbandingan prosentase investasi untuk SPAM dari Pusat, Provinsi, Kab/Kota (rata-rata per tahun)

PMP dari tahun 2006 sd. 2014

Untuk APBD Provinsi = 41.000.000.000

Untuk APBD Kab. Banjar = 113.501.286.615

Jadi, Persentasenya APBD Provinsi 26,54 % dan APBD Kabupaten Banjar 74,46 %

Saat ini PDAM belum memberikan kontribusi/setoran untuk APBD, karena cakupan pelayanan diatas 80% baru akan memberikan setoran PAD.

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

Belum adanya regulator (Instansi/ SKPD) yang menangani pengelola air minum;

Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan;

Pemerintah daerah masih dalam proses menyusun dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa KSDP-SPAM dan RISPAM yang menyeluruh;

Dana untuk pengembangan pelaksanaan SPAM regional sangat besar, sedangkan kemampuan daerah terbatas;

Penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah.

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

Belum memadainya perangkat Peraturan Perundangan (Perda/Perbup) yang diperlukan dalam mengatur penyelenggaraan SPAM, terutama pengaturan dalam rangka pemenuhan air baku air minum serta pengaturan kelembagaan pengelola air minum berbasis masyarakat;

NSPK bidang air minum di tingkat nasional Belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;

Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan sudah ada.

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhankebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

Banyaknya DAS sebagai sumber air baku yang kondisinya semakin memburuk sehingga tidak bisa menyimpan air dengan baik. Selain itu, kondisi sumber air terutama permukaan sungai cenderung semakin tercemar oleh limbah akibat pertambangan yang tidak terkendali, limbah rumah tangga, limbah akibat usaha tambak ikan, penyebaran Ecoli karena aktivitas buang air besar (BAB) sembarangan;

Adanya konflik antara PDAM dengan petambak dan petani yang sama-sama menggunakan sumber dari kawasan Irigasi, Kecamatan Martapura;

Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan/penyimpanan air;

Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai;

Kapasitas daya dukung air baku diberbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik;

Tidak adanya alternatif sumber air baku di Kabupaten Banjar selain sungai (sungai Martapura, sungai Riam Kanan, sungai Riam Kiwa dan sungai Mengkauk);

Sulitnya ketersediaan air baku di lokasi-lokasi yang jauh terjangkau jaringan perpipaan PDAM khususnya wilayah perdesaan disebabkan faktor menurunnya kuantitas dan kualitas air baku air minum.

PENINGKATAN PERAN DAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

Masih kurangnya kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat/swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM;

Belum adanya keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat/swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;

Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;

Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;

Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM.

PENYELENGGARAAN SPAM MELALUI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

Inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pengolahan air masih belum optimal. Di Kecamatan Telaga Bauntung dan Cintapuri Darussalam tidak ada sumber air dan kondisi air asam, sehingga memerlukan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM nya karena masalah air baku atau teknis lainnya;

Belum adanya Inovasi teknologi yang efisien untuk penurunan tingkat kehilangan air.

Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi untuk 75 desa rawan air

Daerah Dataran Tinggi

Daerah Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Pengaron dan Mataraman memanfaatkan melalui jaringan perpipaan dengan sumber air baku berada di IPA Sambung Makmur dengan kapasitas 20 lt/det dan penampungan air hujan (PAH) yang dapat bertahan selama 3 bulan.

Daerah Dataran Rendah/Gambut

Daerah Cintapuri Darussalam memanfaatkan jaringan perpipaan PDAM dan teknologi pengolahan air gambut.

Daerah Pesisir

Daerah Beruntung Baru, Aluh-Aluh dan Sungai Tabuk dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air asin seperti RO (Reverse Osmosis).

TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Tabel 3.12

Tantangan Eksternal dan Tantangan Internal Pengembangan SPAM

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
1	PENINGKATAN AKSES AMAN PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM	Masih minimnya pengembangan sarana dan prasarana pengolahan air minum sampai dengan akhir tahun 2014 berupa sambungan rumah (SR) sebanyak 30.409 kk/unit sedangkan jumlah penduduk 536.329 jiwa	<p>1 Wilayah pelayanan untuk Kabupaten Banjar yang relative luas dan kondisi geografis yang berbeda sehingga ada beberapa wilayah yang belum teraliri air PDAM. Beberapa daerah pelayanan terjauh ada yang sudah dilayani dengan booster station walaupun berdampak pada peningkatan biaya operasi.</p> <p>2 Kontinuitas operasi pelayanan PDAM saat ini sangat tergantung pada kontinuitas listrik PLN. Jika</p>	<p>1 Tingkat kehilangan air atau non revenue water masih relative tinggi yaitu 34,55% sehingga menyebabkan tingkat pelayanan rendah dan menyebabkan kerugian terhadap perusahaan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penurunan kebocoran.</p> <p>2 PDAM baru mampu melayani 37,51% penduduk kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru dikarenakan</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
			<p>listrik PLN mati, maka pelayanan PDAM pun ikut berhenti bahkan lebih lama. Untuk itu, perlu tersedia sumber tenaga listrik cadangan selain listrik PLN.</p>	<p>kapasitas sistem penyediaan air minum yang ada meliputi ketersediaan air baku, intake, pipa transmisi air baku, IPA, reservoir, jaringan pipa distribusi masih terbatas. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat meningkatkan cakupan pelayanan.</p> <p>3 Efisiensi produksi hanya 74,61% disebabkan masih adanya idle kapasitas yang belum dimanfaatkan atau adanya kinerja IPA yang sudah menurun sehingga perlu diadakan upgrading</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
				<p>agar dapat meningkatkan pelayanan.</p> <p>4 Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di semua kegiatan baik fisik maupun non fisik SPAM</p>
2	PENGEMBANGAN PENDANAAN	Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah	1 Kurangnya potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dan donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum dimanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;	1 Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal.

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
				<p>2 PDAM dan Pemerintah Daerah belum mampu untuk meningkatkan pelayanan dikarenakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sistem penyediaan air minum ini memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk membantu kegiatan investasi di PDAM sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dicari alternative sumber pendanaan lain seperti melibatkan pihak swasta ataupun pinjaman lunak.</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
3	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAAN	<p>1 Belum adanya regulator (Instansi/ SKPD) yang menangani pengelola air minum</p> <p>2 Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</p>	<p>1 Rendahnya pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang mengelola air minum</p>	<p>1 Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana kelembagaan di daerah</p> <p>2 Pemerintah daerah masih dalam proses penyusunan dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa KSDP-SPAM dan RISPAM yang menyeluruh</p>
4	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENAGAKAN	Belum memadainya perangkat Peraturan Perundangan (Perda/Perbup) yang diperlukan dalam mengatur penyelenggaraan SPAM, terutama pengaturan	<p>1 Memberikan sanksi yang tegas terhadap pencurian air di masyarakat</p> <p>2 Melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap NSPK</p>	Menindaklanjuti NSPK bidang air minum di tingkat nasional menjadi pengaturan di daerah

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
	HUKUM	dalam rangka pemenuhan air baku air minum serta pengaturan kelembagaan pengelola air minum berbasis masyarakat		
5	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM	1 Banyaknya DAS sebagai sumber air baku yang kondisinya semakin memburuk sehingga tidak bisa menyimpan air dengan baik. Selain itu, kondisi sumber air terutama permukaan sungai cenderung semakin tercemar oleh limbah akibat pertambangan yang tidak terkendali, limbah rumah tangga, limbah akibat usaha tambak ikan,	1 Menghapus pertambangan liar, pengendalian penambakan, pengelolaan air limbah rumah tangga/limbah pabrik, dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat agar kualitas air baku tetap terjaga.	1 Mempertahankan kestabilan kualitas air olahan dalam menghadapi tingginya fluktuasi kualitas air baku yang dipengaruhinya pasang surutnya DAS.

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
		<p>penyebaran Ecoli karena aktivitas buang air besar (BAB) sembarangan.</p> <p>2 Adanya konflik antara PDAM dengan petambak dan petani yang sama-sama menggunakan sumber dari kawasan Irigasi, Kecamatan Martapura.</p> <p>3 Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan</p>	<p>2 Adanya faktor budaya dimana budaya konsumtif dan tidak menghormati lingkungan membuat banyak daerah menjadi resapan air yang beralih fungsi menjadi kawasan peruhan dan permukiman</p>	<p>2 Memperbesar jumlah penampungan air hujan di daerah rawan air untuk mengatasi permasalahan air pada musim kemarau</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3 menurunnya kemampuan peresapan/penyimpanan air 4 Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai	4	5
6	PENINGKATAN PERAN DAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN	1 Masih kurangnya kesadaran,kepedulian dan peran serta masyarakat/swasta dalam penyusunan	1 Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran masyarakat/swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan	1 Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat/swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
	MASYARAKAT	kebijakan keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM	sumber daya air	
		<p>2 Belum adanya keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat/swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</p> <p>3 Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah</p>	<p>2 Mengubah perilaku masyarakat akan gerakan hemat air</p> <p>3 Meningkatkan peran swasta agar tertarik untuk melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM</p>	<p>2 Meningkatkan pembinaan dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3 4 Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas 5 Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM.	4	5
7	PENYELENGGARAAN SPAM MELALUI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI	1 Inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pengolahan air masih belum optimal. Di Kecamatan Telaga Bauntung dan Cintapuri Darussalam tidak ada sumber air dan kondisi air asam, sehingga	1 Kabupaten Banjar memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda seperti daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir sehingga perlu penanganan teknologi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk di setiap daerah	1 Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan. 2 Untuk pengolahan air seperti daerah dengan kondisi air payau memerlukan investasi

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN	
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL
1	2	3	4	5
		<p>memerlukan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM nya karena masalah air baku atau teknis lainnya;</p> <p>2 Belum adanya Inovasi teknologi yang efisien untuk penurunan tingkat kehilangan air.</p>		yang besar

BAB 4

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

KSDP-SPAM Kab. Banjar mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:

Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87%;

SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;

Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019);

Kondisi eksisting untuk JP = 28,35%, dan BJP = 21,81%

Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM/Business Plan PDAM;

Pada tahun 2016 JP= 37,35%, BJP = 25,31% (RPJMD)

Pada tahun 2019 JP= 61,35%, BJP = 34,31% (Pemerintah Daerah)

Pada tahun 2020 Akses air minum aman oleh PDAM 100% (Business Plan PDAM)

Dasar JP PDAM berdasarkan capaian target RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) PDAM, sedangkan dasar BJP Pemerintah Daerah berdasarkan target RPJMD Pemerintah Daerah

Berdasarkan butir a dan b, sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan skenario.

JP oleh PDAM 61,35%

BJP oleh pemerintah daerah 34,31%

JP BJP oleh masyarakat dan swasta 4,34 %

SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2016-2020 dan sasaran MDG's 2020, serta sasaran RPJMN 2015-2019. Adapun arahan kebijakan pembangunan air bersih adalah:

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air bersih dalam pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan produktifitas kerja.

Meningkatkan kinerja pengelola air bersih melalui restrukturisasi kelambagaan dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur BUMD bidang air bersih.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pelayanan air bersih melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan dan perbaikan kinerja pelayanan.

Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air bersih hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20%.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari KSDP-SPAM adalah Dinas PU (SKPD bidang PU) di dukung oleh Setda, Bappeda, Dinas KSDM, Dinas Kesehatan, PDAM.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1

Peningkatan cakupan pelayanan infrastuktur air minum dan kualitas sistem pengelolaan air minum (SPAM).

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Membangun SPAM IKK untuk pemenuhan air minum di 19 kecamatan dan desa rawan air bersih.

Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan.

Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat melalui program PNPM dan PAMSIMAS.

Strategi 2

Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.

Rehabilitasijaringan pipa yang tidak layak pakai seperti Asbes Cement Pipe (ACP) dengan High Density Polyethylene (HDPE).

Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap program penurunan tingkat kebocoran.

Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air dengan menerapkan sanksi yang tegas.

Strategi 3

Menyediakan alternatif penyediaan listrik selain dari PLN. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak menyediakan genset kapasitas besar seperti kapasitas di PLN untuk mengoptimalkan aliran distribusi air pada saat listrik PLN mati.

Strategi 4

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.

Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan berdasarkan usulan masyarakat dan rencana pengembangan SPAM perdesaan.

Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan BPSPAM dan sanitarian.

Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kerja sama lintas instansi pemerintah.

Strategi 5

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.

Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM.

Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.

Melakukan sinkronisasi data dan pemutakhiran dalam hal penentuan cakupan pelayanan dengan indikator penilaian antar instansi penyedia data (PDAM dan Dinas Perumahan dan Permukiman) dan pelaksana kegiatan statistik (BPS).

Kebijakan 2

Optimalisasi Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal.

Strategi 1

Untuk sumber pendanaan yang berasal dari APBN, strategi pengembangan pendanaan untuk pengembangan SPAM yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Membuat dokumen Master Plan Pengembangan Air Minum/RISPAM sebagai pedoman Pengembangan Air Minum untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM.

Menyiapkan Dokumen Perencanaan Teknis yang akurat sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

Mempersiapkan lahan yang selanjutnya akan digunakan untuk Pembangunan IPA.

Strategi 2

Untuk sumber pendanaan yang berasal dari APBD, strategi pengembangan pendanaan untuk pengembangan SPAM yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Prioritas pengembangan air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) pada daerah yang rawan air bersih dan tidak terlayani oleh PDAM serta berdasarkan usulan musrembang daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Memanfaatkan embung, sungai dan mata air sebagai sumber air baku untuk melayani daerah yang rawan air bersih dan tidak terlayani oleh PDAM.

Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah. Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.

Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR.

Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.

Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Kebijakan 3

Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM.

Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan SPAM.

Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi.

Pelunya institusi pembina teknis yang berperan aktif sebagai koordinator yang mampu mengintegrasikan kepentingan lingkungann secara lokal dan regional para pengelola pelaksana program SPAM.

Strategi 2

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Meningkatkan kualitas BPSPAM yang terdapat di desa-desa.

Strategi 3

Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, partisipatif, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional.

Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.

Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.

Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.

Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent (CoE).

Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.

Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas.

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien.

Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset.

Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM.

Kebijakan 4

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah.

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 38/2007).

Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:

Penyelenggaraan Penyelenggara SPAM;

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM; dan

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.

Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan 5

Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku baik sumber air baku yang berasal dari pegunungan maupun yang berasal dari embung. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.

Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda.

Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (pembatasan peningkatan jumlah sumur bor).

Memfasilitasi dan sosialisasi ke kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan (embung), terutama di daerah pemukiman.

Meningkatkan kapasitas air baku yang berlebih dimusim hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau

Pengalokasian sumber dana bagi pelestarian sumber air baku, sebagai upaya mengintegrasikan aspek pembiayaan dalam pembangunan dan pengelolaan SPAM

Strategi 2

Adanya kebijakan pembagian air dari pemerintah daerah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Adanya sosialisasi dari pemerintah daerah ke masyarakat tentang kebijakan pembagian air.

Perlunya dibentuk komunitas peduli air oleh tokoh masyarakat, dan juga instansi pemerintah terkait dan masyarakat pemanfaat air, yang bertujuan

supaya dari adanya komunitas tersebut adanya pembagian air yang berkeadilan.

Adanya konsiliasi, konsiliasi dilakukan sebagai hasil dari mediasi dimana para pihak dalam keputusannya kemudian membentuk semacam forum yang dibentuk atas kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi sarana komunikasi antar pemanfaatn sumber daya air, dan juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah perebutan pemanfaatan air.

Strategi 3

Menetapkan beban maksimal limbah yang boleh dibuang ke sumber dan badan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap pembuangan air limbah baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang berada di daerah bantaran sungai

Membangun sistem pengolahan limbah cair komunal (terpusat) dikawasan permukiman serta kawasan industri dan mengembangkan teknologi perbaikan kualitas air

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Bantuan program adopsi ISO 4064 menjadi Standar Nasional Indonesia dan menetapkan sebagai SNI wajib.

Memberikan bantuan pelayanan sekurang-kurangnya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) yang berlaku.

Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.

Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian.

Memberikan penghargaan dan insentif kepada BP-SPAM yang berhasil dalam mengelola dan meningkatkan SPAM.

Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (water safety plan).

Kebijakan 6

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan pengembangan SPAM dengan rencana tindak melibatkan peran serta masyarakat dalam rencana pengembangan SPAM khususnya di wilayah perdesaan melalui program pemberdayaan masyarakat dan forum musrembang baik melalui tingkatdesa/kecamatan.

Strategi 2

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan sadar hemat air dengan rencana tindak melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan serta sosialisasi tentang pentingnya menghemat air karena air bersih.

Strategi 3

Meningkatkan kepedulian masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/yang tidak termasuk wilayah pelayanan PDAM.

Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.

Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.

Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.

Menyebarkan contoh keberhasilan (best practice) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.

Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM disesuaikan dengan kondisi geografis Kabupaten Banjar yang terdiri dari Daerah Dataran Tinggi, Dataran Rendah dan Daerah Pesisir.

Strategi 1

Strategi yang berkaitan dengan sasaran kawasan permukiman di daerah dataran tinggi

Pembuatan embung yang mempunyai sumber air yang berasal dari air hujan

Memberikan perlindungan kepada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi mata air.

Strategi 2

Strategi yang berkaitan dengan sasaran kawasan permukiman di daerah dataran rendah

Mengembangkan teknologi dan instalasi pengolahan air yang berasal dari lahan gambut, dengan tujuan menyeimbangkan ph air tersebut

Strategi 3

Strategi yang berkaitan dengan sasaran kawasan permukiman di daerah pesisir

Mengembangkan teknologi dan instalasi pengolahan air yang berasal dari sumber air yang mempunyai tingkat salinitas tinggi sehingga layak konsumsi. (Sistem Reverse Osmosis)

Membangun sistem instalasi Penampungan Air Hujan di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi curah hujan tinggi untuk membantu penyediaan air baku.

BAB 5

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

UMUM

Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM 2019), pencapaian target RPJMN (2015-2019), RPJMD (2016-2020) yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah:

Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan	61,35 %
Pelayanan BJP yang terlindungi	34,31 %
Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas di targetkan	<u>4,34 %</u>

Total 100,00 %

Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan kapasitas produksi :

1. Untuk IPA Syarkawi diperlukan penambahan kapasitas produksi sebesar 250 ltr/dtk (dari 250 ltr/dtk menjadi 500 ltr/dtk, untuk tahun 2017-2020)
2. Untuk IPA Pinus diperlukan penambahan kapasitas produksi sebesar 500 ltr/dtk (dari 200 ltr/dtk menjadi 700 ltr/dtk, untuk tahun 2017-2020)

Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas produksi dapat meningkatkan jumlah SR sebanyak 57.691 SR (dari 32.504 SR menjadi 90.195 SR) penurunan NRW 10% (dari 30% menjadi 20%)

Sesuai Business plan PDAM Kabupaten Banjar untuk mencapai sasaran tersebut diatas, Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar ini memerlukan dana Rp. 1.190.799.000,- (hanya tahun 2013) dengan rencana investasi (SKENARIO PEMBIAYAAN) sebagai berikut (Rp)

Unit air baku	117.000.000.000,-	diharapkan dari APBN
Unit produksi	80.000.000.000,-	diharapkan dari APBN
Unit distribusi	78.000.000.000,-	diharapkan dari APBN, APBD, PDAM
Unit pelayanan	114.226.556.875,-	diharapkan dari APBD dan PDAM
Non fisik	6.000.000.000,-	

Total → 658.226.556.875,- (Perhitungan Business Plan PDAM 2012-2017)

Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan P.S Masyarakat. Dengan rencana investasi (SKENARIO PEMBIAYAAN) sebagai berikut (Rp):

PMA	85.750.314.000,-	diharapkan dari APBD dan APBN
SIPAS	11.349.310.000,-	diharapkan dari APBD dan APBN
Sumur Bor	40.353.089.000,-	diharapkan dari APBD dan APBN

Total → 137.452.713.000,-

Biaya Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas dengan rencana investasi (SKENARIO PEMBIAYAAN) sebagai berikut (Rp):

Swasta dan Pokmas	82.946.709.300,-	diharapkan dari CSR dan Masyarakat
-------------------	------------------	------------------------------------

ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi.

KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM;

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum;

Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.

BAB 6

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Banjar ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah daerah tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSDP-SPAM Kabupaten Banjar akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

KSDP-SPAM Kabupaten Banjar ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait SKPD Kabupaten Banjar sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Tabel 6.1

Matriks Indikator, Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Banjar

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN AKSES AMAN PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM	Masih minimnya pengembangan sarana dan prasarana pengolahan air minum sampai dengan akhir tahun 2014 berupa sambungan rumah (SR) sebanyak 30.409 kk/unit sedangkan jumlah penduduk 536.329 jiwa	1 Wilayah pelayanan untuk Kabupaten Banjar yang relative luas dan kondisi geografis yang berbeda sehingga ada beberapa wilayah yang belum teraliri air PDAM. Beberapa daerah pelayanan terjauh ada yang sudah dilayani dengan booster station walaupun berdampak pada peningkatan biaya operasi.	1 Tingkat kehilangan air atau non revenue water masih relative tinggi yaitu 34,53% sehingga menyebabkan tingkat pelayanan rendah dan menyebabkan kerugian terhadap perusahaan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penurunan kebocoran.	PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN KUALITAS SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM (SPAM)	1 Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	1 Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 2 Membangun SPAM IKK untuk pemenuhan air minum di 20 kecamatan dan desa rawan air bersih. 3 Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat melalui program PNFM dan PAMSIMAS.
			2 Kontinuitas operasi pelayanan PDAM saat ini sangat tergantung pada kontinuitas listrik PLN. Jika listrik PLN mati, maka pelayanan PDAM pun ikut berhenti	2 PDAM baru mampu melayani 37,51% penduduk kabupaten Banjar dan Kota Banjar baru dikarenakan kapasitas sistem penyediaan air minum yang ada meliputi ketersediaan		2 Menurunkan tingkat kehilangan air	1 Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air. 2 Rehabilitasi jaringan pipa yang tidak layak pakai seperti Asbes Cement Pipe (ACP) dengan High Density Polyethylene (HDPE). Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>bahkan lebih lama. Untuk itu, perlu tersedia sumber tenaga listrik cadangan selain listrik PLN.</p>	<p>air baku, intake, pipa transmisi air baku, IPA, reservoir, jaringan pipa distribusi masih terbatas. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat meningkatkan cakupan pelayanan.</p>			<p>3 terhadap program penurunan tingkat kebocoran. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air dengan menerapkan sanksi yang tegas.</p> <p>4</p>
				<p>3 Efisiensi produksi hanya 74,61% disebabkan masih adanya idle kapasitas yang belum dimanfaatkan atau adanya kinerja IPA yang sudah menurun sehingga perlu diadakan upgrading agar dapat meningkatkan pelayanan.</p> <p>4 Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di semua kegiatan baik fisik maupun non fisik SPAM</p>		<p>3 Menyediakan alternatif penyediaan listrik selain dari PLN</p> <p>4 Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan</p>	<p>1 Menyediakan genset kapasitas besar seperti kapasitas di PLN untuk mengoptimalkan aliran distribusi air pada saat listrik PLN mati</p> <p>1 Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.</p> <p>2 Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan berdasarkan usulan masyarakat dan rencana pengembangan SPAM perdesaan.</p> <p>3 Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
						berkelanjutan	<p>4 sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan BPSPAM dan sanitarian. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kerja sama lintas instansi pemerintah.</p>
						<p>5 Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum</p>	<p>1 Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar</p> <p>2 institusi/ lembaga di pusat maupun di</p> <p>3 daerah serta lintas sektor.</p> <p>Menetapkan institusi/ lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan</p> <p>4 sistem informasi Penyelenggaraan</p> <p>5 SPAM.</p> <p>Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.</p> <p>Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.</p> <p>Melakukan sinkronisasi data dan pemutakhiran dalam hal penentuan cakupan pelayanan dengan indikator penilaian antar instansi penyedia data (PDAM dan Dinas Perumahan dan Permukiman) dan pelaksana kegiatan statistik (BPS).</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PENGEMBANGAN PENDANAAN	Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah	1 Kurangnya potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dan donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum dimanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;	1 Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum dimanfaatkan secara optimal. 2 PDAM dan Pemerintah Daerah belum mampu untuk meningkatkan pelayanan dikarenakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sistem penyediaan air minum ini memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk membantu kegiatan investasi di PDAM sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dicari alternative sumber pendanaan lain seperti melibatkan pihak	OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PENDANAAN UNTUK PENYELENGGARAAN SPAM	1 Untuk sumber pendanaan yang berasal dari APBD 2 Untuk sumber pendanaan yang berasal dari APBD	1 Membuat dokumen Master Plan Pengembangan Air Minum/RISPAM sebagai pedoman Pengembangan Air Minum untuk 5 (lima) tahun ke depan. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM. 4 Menyiapkan Dokumen Perencanaan Teknis yang akurat sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Mempersiapkan lahan yang selanjutnya akan digunakan untuk Pembangunan IPA. 1 Prioritas pengembangan air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) pada daerah yang rawan air bersih dan tidak terlayani oleh PDAM. 2 Memanfaatkan embung, sungai dan mata air sebagai sumber air baku untuk melayani daerah yang rawan air bersih dan tidak terlayani oleh PDAM. 3 Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah. Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>swasta ataupun pinjaman lunak.</p>		<p>3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).</p>	<p>1 Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. 2 Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR. 3 Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 4 Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. 5 Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.</p>
3	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	<p>1 Belum adanya regulator (Instansi/SKPD) yang menangani pengelola air minum</p> <p>2 Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</p>	<p>1 Rendahnya pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang mengelola air minum</p>	<p>1 Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana kelembagaan di daerah</p> <p>2 Pemerintah daerah masih dalam proses penyusunan dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa KSDP-SPAM dan RISPAM yang menyeluruh</p>	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN SPAM	<p>1 Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM</p>	<p>1 Mengetektikkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM.</p> <p>2 Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan SPAM.</p> <p>3 Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi. Pelunya institusi pembina teknis yang berperan aktif sebagai koordinator yang mampu mengintegrasikan kepentingan lingkungan secara lokal dan regional para pengelola pelaksana program SPAM</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>2 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM</p>	<p>1 Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas BPSPAM yang terdapat di desa-desa</p>
						<p>3 Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM</p>	<p>1 Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, partisipatif, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional.</p> <p>2 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.</p> <p>3 Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.</p> <p>4 Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.</p> <p>5 Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.</p>
						<p>4 Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent</p>	<p>1 Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent (CoE).</p> <p>2 Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.</p> <p>3 Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
							diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas.
						5 Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. 2 Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM. 3
4	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENAGAKAN HUKUM	Belum memadainya perangkat Peraturan Perundangan (Perda/Perbup) yang diperlukan dalam mengatur penyelenggaraan SPAM, terutama pengaturan dalam rangka pemenuhan air baku air minum serta pengaturan kelembagaan pengelola air minum berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memberikan sanksi yang tegas terhadap pencurian air di masyarakat. 2 Melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap NSPK 	Menindaklanjuti NSPK bidang air minum di tingkat nasional menjadi pengaturan di daerah	PENYELENGGARAAN DAN PENERAPAN NSPK DI PUSAT DAN DI DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM 2 Menerapkan NSPK yang telah tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 38/2007) 2 Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Penyelenggara SPAM; b) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM; dan c) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM. 1 Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK. 2 Memfasilitasi penyusunan Rencana

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
							Induk Penyelenggaraan SPAM.
5	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM	<p>1 Banyaknya DAS sebagai sumber air baku yang kondisinya semakin memburuk sehingga tidak bisa menyimpan air dengan baik. Selain itu, kondisi sumber air terutama permukaan sungai cenderung semakin tercemar oleh limbah akibat pertambangan yang tidak terkendali, limbah rumah tangga, limbah akibat usaha tambak ikan, penyebaran Ecoli karena aktivitas buang air besar (BAB) sembarangan.</p> <p>3 Adanya konflik antara PDAM dengan petambak dan petani yang sama-sama menggunakan sumber dari kawasan Irigasi, Kecamatan Martapura.</p> <p>4 Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>	<p>1 Menghapus pertambangan liar, pengendalian penambak ikan, pengelolaan air limbah rumah tangga/limbah pabrik, dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat agar kualitas air baku tetap terjaga.</p> <p>2 Adanya faktor budaya dimana budaya konsumtif dan tidak menghormati lingkungan membuat banyak daerah menjadi resapan air yang beralih fungsi menjadi kawasan perurban dan permukiman</p>	<p>1 Mempertahankan kestabilan kualitas air olahan dalam menghadapi tingginya fluktuasi kualitas air baku yang dipengaruhi pasang surutnya DAS.</p> <p>2 Memperbesar jumlah penampungan air hujan di daerah rawan air untuk mengatasi permasalahan air pada musim kemarau</p>	PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR BAKU	<p>1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku sumber air baku yang berasal dari pegunungan maupun yang berasal dari embung</p>	<p>1 Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.</p> <p>2 Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang konvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda.</p> <p>3 Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>4 Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (pembatasan peningkatan jumlah sumur bor).</p> <p>5 Memfasilitasi dan sosialisasi ke kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan (embung), terutama di daerah permukiman.</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>dan tingginya alih fungsi lahan mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan/penyimpanan air</p> <p>Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai</p>					<p>Meningkatkan kapasitas air baku yang berlebih dimusim hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau.</p> <p>Pengalokasian sumber dana bagi pelestarian sumber air baku, sebagai upaya mengintegrasikan aspek pembiayaan dalam pembangunan dan pengelolaan SPAM</p>
						2 Adanya kebijakan pembagian air dari pemerintah daerah	<p>1 Adanya sosialisasi dari pemerintah daerah ke masyarakat tentang kebijakan pembagian air.</p> <p>2 Perlu nya dibentuk komunitas peduli air oleh tokoh masyarakat, dan juga instansi pemerintah terkait dan masyarakat pemanfaat air, yang bertujuan supaya dari adanya komunitas tersebut adanya pembagian air yang berkeadilan.</p> <p>3 Adanya konsiliasi, konsiliasi dilakukan sebagai hasil dari mediasi dimana para pihak dalam keputusannya kemudian membentuk semacam forum yang dibentuk atas kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi sarana komunikasi antar pemanfaatn sumber daya air, dan juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah perebutan pemanfaatan air.</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
						3 Menetapkan beban maksimal limbah yang boleh dibuang ke sumber dan badan air	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap pembuangan air limbah baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang berada di daerah bantaran sungai. 2 Membangun sistem pengolahan limbah cair komunal (terpusat) dikawasan pemukiman serta kawasan industri dan mengembangkan teknologi perbaikan kualitas air
						4 Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bantuan program adopsi ISO 4064 menjadi Standar Nasional Indonesia dan menetapkan sebagai SNI wajib. 2 Memberikan bantuan pelayanan sekurang-kurangnya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) yang berlaku. 3 Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. 4 Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian. 5 Memberikan penghargaan dan insentif kepada BP-SPAM yang berhasil dalam mengelola dan meningkatkan SPAM. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (water safety

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
							6 plan).
6	PENINGKATAN PERANDAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT	<p>1 Masih kurangnya kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat/swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM</p> <p>2 Belum adanya keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat/swasta dalam pelaksanaan</p>	<p>1 Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran masyarakat/swasta dalam penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan sumber daya air</p> <p>2 perencanaan sumber daya air</p> <p>3 Mengubah perilaku masyarakat akan gerakan hemat air</p> <p>Meningkatkan peran</p>	<p>1 Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat/swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air</p> <p>2 Meningkatkan pembinaan dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM</p>	PENINGKATAN PERANDAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT	<p>1 Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan pengembangan SPAM</p> <p>2 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan sadar hemat air</p>	<p>1 Melibatkan peran serta masyarakat dalam rencana pengembangan SPAM khususnya di wilayah perdesaan melalui program pemberdayaan masyarakat dan forum musrembang baik melalui tingkat desa/kecamatan</p> <p>1 Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan serta sosialisasi tentang pentingnya menghemat air karena air bersih</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3 pengelolaan sumber daya air</p> <p>4 Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah</p> <p>5 Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas</p> <p>Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM.</p>	<p>swasta agar tertarik untuk melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM</p>			<p>3 Meningkatkan kepedulian masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM</p>	<p>1 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah</p> <p>2 perdesaan/ yang tidak termasuk wilayah pelayanan PDAM. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan</p> <p>3 kemajuan kinerja layanan air minum,</p> <p>4 meliputi aspek teknis,</p> <p>5 administrasi/manajemen, dan</p> <p>6 keuangan.</p> <p>7 Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.</p> <p>8 Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.</p> <p>9 Menyebarluaskan contoh keberhasilan (best practice) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.</p> <p>Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.</p> <p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah</p>

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
							tangkapan air.
7	PENYELENGGA RAAN SPAM MELALUI PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI	1 Inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pengolahan air masih belum optimal. Di Kecamatan Telaga Bauntung dan Cintapuri Darussalam tidak ada sumber air dan kondisi air asam, sehingga memerlukan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM nya karena masalah air baku atau teknis lainnya;	1 Kabupaten Banjar memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda seperti daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir sehingga perlu penanganan teknologi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk di setiap daerah	1 Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan. Untuk pengolahan air seperti daerah dengan 2 kondisi air payau memerlukan investasi yang besar	PENYELENGGA RAAN INOVASI TEKNOLOGI SPAM	1 Strategi yang berkaitan dengan sasaran kawasan pemukiman di daerah dataran tinggi 2 Strategi yang berkaitan dengan sasaran kawasan pemukiman di daerah dataran rendah 3 Strategi yang berkaitan dengan sasaran kawasan pemukiman di daerah pesisir	1 Pembuatan embung yang mempunyai sumber air yang berasal dari air hujan 2 Memberikan perlindungan kepada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi mata air 1 Mengembangkan teknologi dan instalasi pengolahan air yang berasal dari lahan gambut, dengan tujuan menyeimbangkan ph air tersebut 1 Mengembangkan teknologi dan instalasi pengolahan air yang berasal dari sumber air yang mempunyai tingkat salinitas tinggi sehingga layak konsumsi. (Sistem Reverse Osmosis). Membangun sistem instalasi

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	TANTANGAN		KEBUJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
			TANTANGAN EKSTERNAL	TANTANGAN INTERNAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Belum adanya Inovasi teknologi yang efisien untuk penurunan tingkat kehilangan air.					<p>2 Penampungan Air Hujan di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi curah hujan tinggi untuk membantu penyediaan air baku.</p> <p>4 Sumber-sumber air baru dicari dan dicoba kemungkinannya</p> <p>1 Mencari sumber air baru (air tanah, air danau, air sungai, dan sebagainya). Mengolah dan menawarkan air laut atau sumber air yang berkadar garam tinggi.</p> <p>2 Mengolah dan memurnikan kembali air kotor (air tercemar) baik yang berada di sungai, di danau, ataupun pada tempat-tempat lainnya yang memungkinkan.</p> <p>3 Mengolah dan memurnikan air hujan.</p> <p>4</p>

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI